



SUMBER BERITA

<input checked="" type="checkbox"/>	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU

KATEGORI BERITA UNTUK BPK

POSITIF NETRAL BAHAN PEMERIKSAAN PERHATIAN KHUSUS

Wabup: Terima Kasih Tim Sudah Bekerja



KOTA MANNA - Setelah tujuh tahun tidak meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI, akhirnya kemarin (27/5) Pemkab Bengkulu Selatan (BS) meraih WTP berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI Perwakilan Provinsi Bengkulu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2021.

Wakil Bupati BS Rifai Tajuddin mengatakan capaian tersebut merupakan kerja keras tim Pemkab BS. Terakhir kali Pemkab BS meraih WTP yakni tahun 2014 di masa kepemimpinan eks Bupati BS Reskan Effendi. Dan atas raihan tersebut, Wabup mengaku senang, syukur dan bangga.

"Bukan capaian karena seseorang tapi karena tim yang hebat. Terima kasih tim, Pak Sekda, Inspektorat, BPKAD dan semua. Ini menjadi prestasi yang kita harapkan dari tujuh tahun yang lalu, untuk tahun kedepan kami yakin dan optimis dapat mempertahankan opini ini," sampai Wabup yang mewakili Bupati BS Gusnan Mulyadi yang berhalangan hadir.

Lebih lanjut disampaikan Wabup, dengan telah diterimanya

LHP ini untuk dapat dijadikan sebagai acuan dan pedoman demi meningkatkan sistem pengelolaan keuangan daerah dengan tetap patuh terhadap aturan agar pengelolaan keuangan daerah menjadi lebih baik.

Pemkab BS bersama DPRD juga telah berkomitmen untuk terus berbenah dalam aspek tata kelola pengelolaan keuangan dengan terus meningkatkan pengawasan dan pengendalian internal.

"Tetap kita berkerja keras, bimbingan dan arahan juga agar penyelenggaraan dan tata kelola keuangan Pemerintah BS di masa yang akan datang dapat terlaksana dengan baik," kata Wabup.

Senada disampaikan Sekda BS Sukarni, SP M.Si juga ungkapkan syukur atas raihan WTP ini, dan ini memang menjadi hasil yang memang diharapkan oleh Pemer-

intah Kabupaten BS.

Dilanjutkan, Sukarni bahwa dari hasil LHP dari BPK ini ada beberapa hal yang harus segera kita perbaiki dan perlu kita tingkatkan kedepan terutama yang terkait dengan kepatuhan terhadap berbagai regulasi dalam pengelolaan keuangan daerah baik itu pendapatan maupun belanja dan hal hal lainnya.

"Untuk itu ini menjadi PR kami dalam tim yang berkaitan dengan pemeriksaan keuangan diantaranya Sekretariat Daerah, Inspektorat dan BPKAD. Kita akan mulai melakukan rencana aksi yang baru untuk melakukan berbagai hal dalam upaya pembenahan pengelolaan keuangan daerah ke depan, semoga di tahun tahun mendatang kita tetap bisa mempertahankannya" pungk